BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian.Hasil penelitian merupakan hasil yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega. Hasil tersebut berupa data-data dan informasi yang mendukung penelitian yang peneliti lakukan.

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega

Pada dasarnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasioanal pelayanan perpajakan dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Aspek-aspek yang dijalankan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan penatausahaan, penerimaan penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi keberatan pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan pajak tidak langsung lainya.

2. Kegiatan pemeriksaan dan penerapan sanksi perpajakan.
3. Kegiatan penngumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan, menyelenggarakan potensi pajak serta ekstensifikasi pajak.
4. Kegiatan penatausahaan dan Pengecekan Surat Pajak Tahunan atau Surat Pajak Masa berdasarkan Wajib Pajak
5. Melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya.

   Dalam gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega, akan dijabarkan sejarah singkat berikut struktur organisasi yang menguraikan tugas dan fungsi bagian-bagian yang ada didalamnya, sehingga akan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kegiatan yang sedang diteliti.

4.1.1.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayana Pajak Pratama Bandung Tegalega

Perkembangan pajak di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, dimana pada waktu sudah ada pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *Oorlogs Avergangs Blastik* yang berarti "pajak peralihan". Separti layaknya pemungutan pajak seperti saat ini, pemungutan pajak pada jaman dulu dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku pada saat itu. Pemungutan ini dilaksanakan oleh badan yang bernama *Inspectie Vinantie,* yang memiliki wewenang untuk mengurus dan mengawasi masalah pemungutan pajak yang dilakukan secara paksa pada rakyat.

Keluar dari masa penjajahan Balanda, Indonesia masuk dalam masa penjajahan Jepang. Pada masa pemerintahn Jepang. Istilah Oorlogs Avergangs

Blastik diganti dengan Zaimuba, yang diberi tugas untuk mengurus masalah keungan Jepang di Indonesia. Lepas dari tangan penjajahan Jepang, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintahan baru Indonesia mengganti istilah Zaimuba dengan "Inspeksi Keuangan". Badan ini bertempat Corcodia (Gedung Merdeka) Badung yng terletak di jalan Raya Barat atau untuk sekarang lebih dikenal dengan nama Asia Afrika. Inspeksi Keuangan Bandung meliputi daerah swatantra tingkat II Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar.

Ketika terjadi Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Agustus 1947, Kantor Inspeksi Keuangan dipindah ke Kabupaten Soreang dengan alasan agar tidak terganggu. Namun pemindahan ini tidak menjadi solusi yang baik, perang tidak terhindarkan, tanggal 19 Desember 1948 terjadi Agresi Militer Belanda II, dimana ibu kota Negara Republik Indonesia yang saat itu terletak di Yogyakarta direbut oleh Belanda. Untuk mengantisipasi hal yang sama, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan lagi, kali ini ke Tasikmalaya.

Dengan keadaan diatas, terbentuklah perbedaan teknis yang terbagi menjadi dua bagian:

1. Kelompok yang bekerja dengan Belanda dan menolak pindah ke Tasikmalaya. Kelompok ini menganut sistem cooperative (Inpeksi Keuangan Bandung);
2. Kelompok yang menganut system non cooperative, yang mana kelompok ini pindah ke Tassikmalaya dan tidak bekerja sama dengan belanda.

Setelah Indonesia diakui kedaulatannya, Kantor Inspeksi Keuangan yang berkedudukan di Tasikmalaya bergabung kembali dengan Kantor Inspeksi Keuangan di Bandung, dan seiring berjalannya waktu, denagn bertambahnya penduduk serta berkembangnyatingkat eknomi rakyat, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Daerah wewenangnya sendiri meliputi daerah swatantra tingkat II Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis yang berkedudukan di jalan Asia Afrika No. 114 Bandung, sedangkan untuk Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang berkedudukan di Karawang.

Pada tahun 1967 Inspeksi Pajak Bandung dipecah lagi menjadi:

1. Inspeksi Pajak Bandung, meliputi Kota Praja Bandung dan Kabupaten Sumedang.
2. Inspeksi Pajak Tasikmalaya, meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Banjar, dan Ciamis yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Seiring berkembangnya jaman, agar lebih bisa mengefektifkan tugasnya, Inspeksi Pajak Bandung dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur yang terletak di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung.
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Bandung.

Melalui Surat Keputusan Menkeu RI No. 276/KMK/1989, terhitung mulai tanggal 1 April 1989, seluruh Kantor Inspeksi Pajak di Indonesia berubah namanya menjadi “Kantor Pelayanan Pajak”. kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menkeu

RI No. 561/KMK.01/1992, tanggal 21 Mei 1992, organisasi Direktorat Jenderal Pajak diadakan reorganisasi, sehingga jumlah Kantor Pelayanan Pajak yang ada menjadi 120 Kantor Pelayanan Pajak. Jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Kodya Bandung sendiri menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

1. KPP Bandung Barat di Jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung.
2. KPP Bandung Timur di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.
3. KPP Bandung Tengah di Jalan Purnawarman No. 21 Bandun.
4. KPP Bandung Cimahi di Jalan Raya Cimahi.

Untuk meningkatkan penerimaan dan pemberian pelayanan pajak kepada masyarakat secara efektif dan efisien, maka perlu diadakan kembali penetapan mengenai organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak. oleh karena itu, diberlakukanlah Surat Keputusan Menkeu RI No. 756/KMK.01/1993, tanggal 3 Agustus 1993, yang disempurnakan lagi dengan Surat Keputusan Menkeu RI No. 94/KMK.01/1994, tanggal 29 Maret 1994, serta penyesuaian dengan wilayah Pemerintahan Tingkat II Kotamadya Bandung, maka Kantor Pelayanan Pajak Kotamdya Bandung dipecah lagi menjadi 5 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

1. KPP Bandung Tegallega di Jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung.
2. KPP Bandung Karees di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.
3. KPP Bandung Cibeunying di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
4. KPP Bandung Bojonagara di Jalan Cipaganti No. 157 Bandung.
5. KPP Cimahi di Jalan Raya Barat Cimahi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkeu RI No. 443/KMK.01/2001, tanggal 23 Juli 2001, yang mulai diberlakukannya pada tanggal 1 Februari 2002, Kantor Pelayanan Pajak Bandung dibagi menjadi 6 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

1. KPP Bandung Tegallega di Jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung.
2. KPP Bandung Karees di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.
3. KPP Bandung Cibeunying di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
4. KPP Bandung Bojonagara di Jalan Cipaganti No. 157 Bandung.
5. KPP Bandung Cicadas di Jalan Soekarno-Hatta No. 781 Bandung.
6. KPP Cimahi di Jalan Raya Barat Cimahi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP.112/PJ/ 2007, tentang penerapan organisasi, tata cara dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi di lingkungn Kantor Wilayah Direktorat Janderal Pajak Banten, Kanwil Jawa Barat I dan II tanggal 28 Agustus 2007, terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2007, Kantor Pelayanan Pajak di Bandung di bagi menjadi:

1. KPP Bandung Tegallega di Jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung.
2. KPP Bandung Karees di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.
3. KPP Bandung Cibeunying di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
4. KPP Bandung Bojonagara di Jalan Cipaganti No. 157 Bandung.
5. KPP Bandung Cicadas di Jalan Soekarno-Hatta No. 781 Bandung.

Adapun wilayah kerja untuk Kantor Pelayanan Pajak Tegallega Bandung meliputi:

1. Kecamatan Bandung Kulon.
2. Kecamatan Astana Anyar.
3. Kecamatan Babakan Ciparay.
4. Kecamatan Bojong Kaler.
5. Kecamatan Bojongloa Timur.

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Bandung Tegallega yaitu:

1. Visi

   Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan system dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi

   Menghimpun Dana Dalam Negeri dari Sektor Pajak yang Mampu Menunjang Kemandirian Pembiayaan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan Tingkat Efektivitas dan Efesiensi yang Tinggi.

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

Struktur organisasi KPP Pratama Bandung Tegalega dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dibantu oleh Kepala Seksi sebagai stafnya. Terdapat 8 seksi dalam struktur organisasi KPP Pratama Bandung Tegallega:

1. Sub Bagian umum
2. Seksi Pelayanan
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
4. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
5. Seksi Pemerikasaan
6. Seksi penagihan
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
8. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari
    a. Kelompok Jabata Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional tang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
    b. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala KPP yang bersangkutan.
    c. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
    d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Bagan Struktur Organisasi ada dilampiran)

4.1.3 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

KPP Pratama merupakan salah satu badan Pelaksanan DJP dibidang pelayanan pajak yang berada dibawah wewenang Kantor Wilayah Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Kantor .Kepala kantor KPP Pratama Bandung Tegallega, mempuyai tugas selain memimpin dan mengkoordinir seluruh pekerjaan kantor, juga melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanandan pengawasan dibidang pemeriksaan dan penagihan. Kepala Kantor dibantu oleh Kepala Seksi sebagai stafnya. Terdapat 8 seksi dalam struktur organisasi KPP Pratama Bandung Tegallega, uraian tugasnya sebagai berikut :

1. Subbagian Umum, mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. Melakukan urusan kepegawaian
    b. Melakukan urusan Keuangan
    c. Melakukan urusan tata usaha
    d. Melakukan urusan rumah tangga
2. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. Penerbitan produk hukum
    b. Administrasi dan penyimpanan produk-produk hokum
    c. Penyuluhan perpajakan
    d. Administrasi dan penyimpanan berkas WP
    e. Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan dan Masa
    f. Penerimaan surat-surat permohonan WP
    g. Penerbitan NPWP dan NPKP, menjawab konfirmasi PPN

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. Pengolahan Data
    b. Perekaman dokumen perpajakan
    c. Penyajian informasi perpajakan
    d. Pelayanan dukungan teknis komputer
    e. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling
    f. Mengadministrasikan dan membuat laporan penerimaan
4. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. Pengamatan potensi perpajakan
    b. Penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi
    c. Pendataan subyek pajak dan obyek pajak (NPWP dan NOP)
    d. Pembuatan Monografi Fiskal
5. Seksi Pemerikasaan, mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. Penyusunan rencana pemeriksaan
    b. Pengawasan pelaksana aturan pemeriksaan
    c. Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
    d. Administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya
6. Seksi Penagihan, mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. Penatausahaan piutang pajak
    b. Penundaan dan angsuran tunggakan pajak
    c. Penagihan aktif
    d. Pembuatan usulan pelelangan dan penghapusan piutang pajak

e. Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. Pengawasan kepatuhan WP
    b. Bimbingan/himbauan kepada WP
    c. Konsultasi teknis perpajakan kepada WP
    d. Penyusunan profil WP
    e. Analisi kerja WP
    f. Rekonsiliasi data WP dalam rangka intensifikasi

Tujuh Etos Kerja Pelayanan KPP Pratama Bandung Tegallega

Dalam upaya untuk selalu mengedepankan kualitas pelayanannya, KPP Pratama Tegallega Bandung memiliki panduan yang dikenal dengan nama"Tujuh Etos Kerja Pelayanan KPP Pratama Bandung Tegallega", yang terdiri dari:

1. Komitmen terhadap janji pelayanan
2. Mempertahanakan profesionalitas demi kepentingan bangsa dan masyarakat
3. Peduli kepada keindahan dan kebersihan
4. Menjaga semangat kerja yang kokoh
5. Menghormati perbedaan dan menjaga kesetaraan
6. Bekerja dengan semangat menyelesaikan masalah wajib pajak dengan cepat, akurat dan professional

7. Menjaga nilai-nilai luhur budaya local dan nasional (sumber berasal dari data-data KPP Pratama Bandung Tegallega yang sudah diolah)

4.1.4 Karakteristik Responden

Data responden dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 397 responden. Untuk variabel X dan Y kuesioner diberikan kepada objek yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Pria	235	59,19%
Wanita	162	40,81%
Jumlah	397	100,00%

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki berjumlah 235 orang atau sebesar 59,19% dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 162 orang atau sebesar 40,81%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi lebih banyak responden laki-laki, dan pada kenyataanya

Wajib Pajak Orang Pribadi laki-laki lebih banyak daripada perempuan pada KPP Pratama Bandung Tegallega.

2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase %
20 – 25 Tahun	65	16,37%
26 – 30 Tahun	60	15,11%
31 – 35 Tahun	67	16,88%
36 – 40 Tahun	80	20,15%
>40 Tahun	125	31,49%
Jumlah	397	100,00%

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia dibawah 20-25 tahun berjumlah 65 orang atau sebesar 16,37%, 26-30 tahun berjumlah 60 orang atau sebesar 15,11%, 31-35 tahun berjumlah 67 orang atau sebesar 16,88%, Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia > 40 tahun. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi lebih banyak berumur >40 tahun. Selain itu rata-rata usia Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegallega berusia > 40 tahun.

3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SD	0	0,00%
SMP	12	3,02%
SMA	67	16,88%
DI-DIII	194	48,87%
S1	124	31,23%
Jumlah	397	100,00%

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan terakhir SD atau sederajat sebanyak 0 orang atau sebesar 0,00%, SMP sebanyak 12orang atau sebesar 3,02% dan responden dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 67 orang atau sebesar 16,88%, D1-D3 sebanyak 194 orang atau sebesar 48,87%, S1-S3 sebanyak 124 atau sebesar 31,23%, Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir D1-D3.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Analisis Kualitatif (Metode Deskriptif)

4.2.1.1 Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Orang pribadi Pada KPP Pratama Bandung Tegallega

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 397 orang Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegallega atas Tingkat Pendidikan Wajib Pajak. Untuk mendapatkan gambaran Tingkat Pendidikan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas ketiga indikator pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Tingginya Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi	1621	1985	82%	Tinggi
	Total	1621	1985	82%	Tinggi

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegallega Tinggi. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai Tingkat Pendidikan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega berdasarkan tiap indikator di atas:

1. Tingginya tingkat pendidikan wajib pajak

Indikator tingkat pendidikan wajib pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Distribusi Jawaban Responden Mengenai tingkat pendidikan wajib pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
3	Tingkat Pendidikan wajib pajak	F	0	12	67	194	124	1621
		%	0	3.02	16.87	48.86	31.23	100%
	Total		0	12	67	194	124	1621
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 82%								

Jumlah skor = Jumlah seluruh Jawaban atas kuesioner
% = jumlah jawaban scoring /Jumlah responden x 100

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.7 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1621}{1x5x397} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1621}{1985} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 82\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 82% termasuk dalam kategori tinggi. Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai Tingkat pendidikan wajib pajak pada indikator ini ditanggapi oleh 48,86% responden yang berpendidikan DI-D3. Ini menunjukan bahwa Tingkat Pendidikan Wajib Pajak tinggi.

4.2.1.2 Kepatuhan Membayar Pajak Pada KPP Pratama Bandung Tegallega

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 397 orang Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegallega atas Kepatuhan Membayar Pajak. Untuk mendapatkan gambaran Kepatuhan Membayar Pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Membayar Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1.	Pemahaman wajib pajak	2251	3970	57%	Cukup Tinggi
2.	Tingginya Tingkat Pendidikan WP	1621	1985	82%	Tinggi
3.	Kemampuan mengisi SPT	2302	3970	58%	Cukup Tinggi
4.	Penyelundupan pajak	1175	1985	59%	Cukup Tinggi
5.	Minimnya tingkat pengetahuan wajib pajak	2238	3970	56%	Cukup Tinggi
	Total	9587	15880	60%	Cukup Tinggi

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden
Skor Aktual = jawaban seluruh responden atas kuesioner yg telah diajukan

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Membayar Pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega Cukup Tinggi. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai Kepatuhan Membayar Pajak ajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega berdasarkan tiap indikator di atas:

1. Pemahaman wajib pajak

Indikator pemahaman wajib pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pemahaman Wajib Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Proses perhitungan pajak	F	72	120	110	50	60	1067
		%	17.00	29.00	27.70	12.58	14.00	100%
2	bantuan konsultan pajak	F	43	110	115	69	60	1184
		%	10.83	27.70	28.96	17.38	15.11	100%
Total		F	115	230	225	119	120	2251
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 57%								

Jumlah skor = Jumlah seluruh Jawaban atas kuesioner
% = jumlah jawaban scoring /Jumlah responden x 100

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.6 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{2251}{2x5x397} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{2251}{3970} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 57\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 57%, bila merujuk pada tabel 4.7 termasuk dalam kategori Cukup Tinggi. Ini menunjukan bahwa pemahaman wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegallega Cukup Tinggi

2. Tingginya tingkat pendidikan wajib pajak

Indikator tingkat pendidikan wajib pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Distribusi Jawaban Responden Mengenai tingkat pendidikan wajib pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
3	Tingkat Pendidikan wajib pajak	F	0	12	67	194	124	1621
		%	0	3.02	16.87	48.86	31.23	100%
	Total		0	12	67	194	124	1621
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 82%								

Jumlah skor = Jumlah seluruh Jawaban atas kuesioner
% = jumlah jawaban scoring /Jumlah responden x 100

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.7 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1621}{1x5x397} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1621}{1985} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 82\%$$

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai Tingkat pendidikan wajib pajak pada indikator ini ditanggapi oleh 48, 86% responden yang berpendidikan DI-DIII. Ini menunjukan bahwa Tingkat Pendidikan Wajib Pajak dikategorikan Tinggi.

3. Kemampuan mengisi SPT

Indikator Kemampuan mengisi SPT diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Distribusi Jawaban Responden Kemampuan mengisi SPT

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
4	*Pengisisan SPT*	**F**	43	110	115	69	60	1184
		%	10.83	27.71	28.97	17.38	15.11	100%
5	*Tingkat kesulitan pengisian spt*	**F**	52	99	164	34	48	1118
		%	13.10	25.00	41.30	8,56	12.09	100%
	Total	**F**	95	209	279	103	108	2302
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 58 %								

Jumlah skor = Jumlah seluruh Jawaban atas kuesioner
% = jumlah jawaban scoring /Jumlah responden x 100

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.8 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{2302}{2x5x397} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{2302}{3970} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 58\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 58% termasuk dalam kategori Cukup Tinggi. Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai pengisian SPT ditanggapi oleh 28,97% responden berpendapat bahwa pengisian SPT biasa saja, namun dilihat dari tingkat kesulitan SPT responden menjawab sebanyak 41.30% berpendapat bahwa tingkat kesulitan pengisian SPT 60.00%. Ini menggambarkan bahwa pengisian SPT biasa saja namun sebagian responden menjawab Cukup sulit untuk pengisian SPT.

4. Penyelundupan pajak

Indikator Penyelundupan pajakdiukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Penyelundupan pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
6	Menurut Ibu/Bapak, bagaimana Jumlah/tarif pajak yang selama ini dibayar oleh Ibu/Bapak	F	48	83	148	73	45	1175
		%	12.09	20.09	37.27	18.38	11.33	100%
	Total		48	83	148	73	45	1175
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 59%								

Jumlah skor = Jumlah seluruh Jawaban atas kuesioner
% = jumlah jawaban scoring /Jumlah responden x 100

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.9 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1175}{1x5x397} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1175}{1985} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 59\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 59% termasuk dalam kategori Cukup Tinggi. Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai tarif pajak ditanggapi oleh 37.27%. responden berpendapat bahwa tarif pajak cukkup tinggi. Diasumsikan bahwa makin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, maka makin tinggi kecenderungan melakukan kecurangan/penyelundupan pajak.

5. Minimnya tingkat pengetahuan wajib pajak

Indikator Minimnya tingkat pengetahuan wajib pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Distribusi Jawaban Responden Mengenai tingkat pengetahuan wajib pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
7	Kapan Bapak/Ibu mengetahui adanya peraturan perpajakan terbaru, misalnya mengenai perubahan tarif / PTKP / batas PKP?	F	52	99	164	34	48	1118
		%	13.09	24.93	41.30	8.56	12.09	100%
8	Setelah mengetahui peraturan perpajakan terbaru, apakah Bapak/Ibu sudah dapat melaksanakannya	F	51	108	142	53	43	1120
		%	12.84	27.20	35.76	13.35	10.83	100%
	Total		103	207	306	87	178	2238
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 56%								

Jumlah skor = Jumlah seluruh Jawaban atas kuesioner
% = jumlah jawaban scoring /Jumlah responden x 100

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.10 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{2238}{2x5x397} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{2238}{3970} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 56\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 56% termasuk dalam kategori Cukup Tinggi. Apabila dikaji lebih dalam maka diperoleh ukuran sebanyak 41.30% responden menjawab bahwa responden mengetahui adanya peraturan

perpajakan terbaru pada saat mengurus pajak saja dan menanyakan kepada petugas,sedangkan sebesar 35.76% responden setelah mengetahui peraturan perpajakan sudah melakukan meski masih terdapat sedikit kesalahan.

4.1.1 Analisis Kuantitatif (Metode Verifikatif)

4.1.1.1 Analisis Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Pada KPP Pratama Bandung Tegallega

Pada sub bab ini, hipotesis yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan dengan melakukan uji statistik. Data variabel X (Tingkat Pendidikan Wajib Pajak) dan variabel Y (Kepatuhan Membayar Pajak) yang digunakan untuk perhitungan korelasi dan regresi.

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Sebelum diuji pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib Pajak (X) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y) pada KPP Pratama Bandung Tegallega, terlebih dahulu dihitung koefisien regresi.

Menggunakan data-data yang tercantum pada tabel 4.15, dapat diestimasi persamaan regressi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = a + bX}$$

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SPSS 17 for windows*, diperoleh output regresi keterkaitan pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi (X) terhadap kepatuhan membayar pajak (Y) pada KPP Pratama bandung tegallega. Maka dapat dilihat hasil pengolahan regresi tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan membayar pajak seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12
Hasil Analisis Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.208	.773		17.084	.000		
	x	2.600	.228	.498	11.399	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: y

Melalui hasil regresi yang terdapat pada tabel diatas maka dapat dibentuk sebuah Persamaan regresi sebagai berikut **Y = 13,208 + 2,600 X**

Dimana: Y = Kepatuhan Membayar Pajak

X = Tingkat Pendidikan WPOP

Nilai konstanta (a) sebesar 13,208 menunjukan nilai Kepatuhan Membayar Pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega apabila Tidak ada Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kemudian nilai Koefisien regresi (b) sebesar 0,498 menunjukan peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak pada KPP Pratama Bandung

Tegallega apabila Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi ditingkatkan sebesar satu satuan. Koefisien regresi memiliki tanda positif, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi akan menurunkan kepatuhan membayar pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega.

2. Analisis Korelasi *Pearson Product Moment*

Kedekatan hubungan antara tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi dengan kepatuhan membayar pajak diukur melalui koefisien korelasi. Korelasi antara tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi dengan kepatuhan membayar pajak dihitung menggunakan korelasi product moment dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\mathrm{n} \sum \mathrm{XY} - \sum \mathrm{X} \sum \mathrm{Y}}{\sqrt{[(\mathrm{n} \sum \mathrm{X}^2 - (\sum \mathrm{X})^2) \times (\mathrm{n} \sum \mathrm{Y}^2 - (\sum \mathrm{Y})^2)]}}$$

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SPSS 17 for windows*, diperoleh hasil estimasi besarnya hubungan antara tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi mempengaruhi kepatuhan membayar pajak pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.13
Korelasi Antara Tingkat Pendidikan WPOP dengan Kepatuhan Membayar Pajak

Correlations

		Kepatuhan Membayar Pajak	Tingkat Pendidikan WPOP
Pearson Correlation	Kepatuhan Membayar Pajak	1.000	.498
	Tingkat Pendidikan WPOP	.498	1.000
Sig. (1-tailed)	Kepatuhan Membayar Pajak	.	.000
	Tingkat Pendidikan WPOP	.000	.
N	Kepatuhan Membayar Pajak	397	397
	Tingkat Pendidikan WPOP	397	397

Melalui hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa besar hubungan antar variabel tingkat pendidikan wajib pajak op dengan kepatuhan membayar pajak yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,498. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang erat/kuat antara tingkat pendidikan wajib pajak op dengan kepatuhan membayar pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa semakin Tinggi tingkat pendidikan wajib pajak op akan membuat kepatuhan membayar pajak yang dilakukakan semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan wajib pajak op akan membuat kepatuhan membayar pajak makin rendah.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R-square) merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi dengan menggunakan *software* SPSS 17 *for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.14
Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.498[a]	.248	.246	4.141

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan WPOP

b. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai R-square adalah sebesar 0,935 nilai ini dikenal dengan koefisien determinasi (KD).

KD = 0,248 x 100% = 24,8%

Koefisien determinasi sebesar 24,8% menunjukkan bahwa 24,8% perubahan yang terjadi pada kepatuhan membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega bisa dijelaskan oleh tingkat pendidikan wpop. Artinya tingkat pendidikan wpop mampu memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega sebesar 24,8%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 75,2 % dijelaskan variabel lain di luar

variabel tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi, seperti kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan (Ikhsan Budi R:2007)

4.1.1.2 Uji Hipotesis

Pada bagian ini hipotesis konseptual yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan melalui uji statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan seperti yang telah dituangkan di dalam Bab III adalah adanya pengaruh dari Tingkat Pendidikan Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi.

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini dituangkan kedalam bentuk hipotesis statistik sebagai berikut.

Ho: $\beta = 0$ Tingkat Pendidikan Wajib Pajak (X) tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan membayar pajak (Y) pada KPP Pratama Bandung Tegallega.

Ha: $\beta \neq 0$ Tingkat Pendidikan Wajib Pajak (X) memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan membayar pajak (Y) pada KPP Pratama Bandung tegallega..

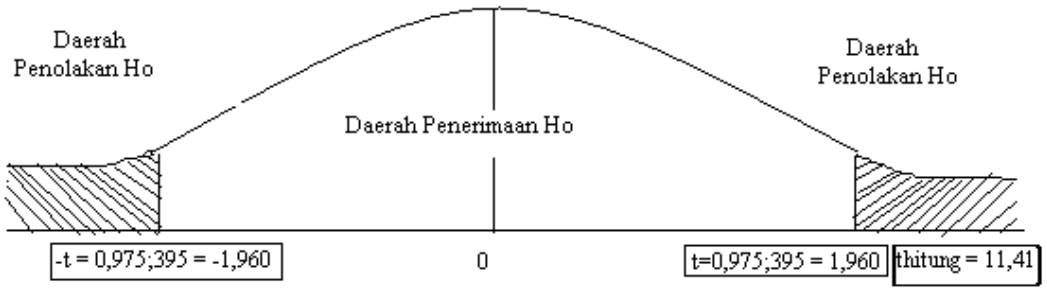
Selanjutnya, masih dengan menggunakan data perhitungan *software* SPSS 17.0 *for windows*, akan dilakukan pengujian hipotesis untuk menguji signifikansi pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Melalui persamaan regresi yang diperoleh di atas akan diuji apakah tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi benar-benar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan kata lain, akan dilakukan pengujian apakah tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi benar-benar

merupakan salah satu faktor penunjang kepatuhan membayar pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega. Nilai statistik uji t dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$t_{hitung} = r_{xy} \text{ x } \sqrt{\frac{n-2}{1-(r_{xy})^2}} = 0,\ 498 \text{ x } \sqrt{\frac{397-2}{1-(0,498)^2}} = 0,498 \text{ x } \sqrt{\frac{395}{0,751996}}$$

$$= 11,\ 41$$

Melalui hasil perhitungan di atas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 11,41 sementara pada t_{tabel} dengan tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas (397-2) = 395 diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,960. Karena t_{hitung} (11,41) lebih besar dari t_{tabel} (1,960), maka pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan membayar pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan membayar pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega.



Gambar 4.1
Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho